

Perspektif Pemangku Kepentingan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Stakeholder Perspective in Penukal Abab Lematang Ilir District Concerning Household Waste Management

Dian Novriadhy^{1*)}, Ani Kurnia², Sri Maryani¹, Achmad Ubaidillah¹, Hendrixon¹

¹Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan,
Palembang, Indonesia, 30137

²Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten PALI, Talang Ubi, PALI

*¹Penulis untuk korespondensi: dian.novriadhy@gmail.com

Sitasi: Novriadhy D, Kurnia A, Maryani S, Ubaidillah A, Hendrixon. 2019. Perspektif pemangku kepentingan di kabupaten penukul abab lematang ilir tentang pengelolaan sampah rumah tangga. *In: Herlinda S et al. (Eds.), Prosiding Seminar Nasional Lahan Suboptimal 2018, Palembang 18-19 Oktober 2018.* pp. 347-353. Palembang: Unsri Press.

ABSTRACT

Households are the biggest waste producers. Therefore, household waste management must be done carefully and efficiently - especially for the New Autonomous Region - so as not to consume all resources that needed for development. This research was carried out in PALI District with the aim to identify the needs in waste management based on cross-sectoral stakeholder perspectives. Research informants came from local government units, nongovernment organizations, waste management practitioners, and small business groups. Data collected through FGD, observation and literature search. The data is processed with a qualitative approach and interpreted by the input-process-output method. The results showed three key factors needed for waste management i.e. the existence of the compost market, the availability of environmental cadres, and an environmental management working group that could synergize programs/activities from various stakeholders whereas the supporting factors were the funding method, regulatory enforcement, and adequate facilities-infrastructure. The research concluded that there is a need to change community behavior and work culture.

Keywords: **compost market, environmental cadre, environmental management working group, financing patterns**

ABSTRAK

Rumah tangga adalah penghasil sampah terbesar. Oleh karena itu, pengelolaan sampah rumah tangga harus dilakukan dengan hati-hati dan efisien - terutama untuk Daerah Otonomi Baru - agar tidak mengkonsumsi semua sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten PALI dengan tujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dalam pengelolaan limbah berdasarkan perspektif stakeholder lintas sektoral. Informan penelitian berasal dari unit pemerintah lokal, organisasi nonpemerintah, praktisi pengelolaan limbah, dan kelompok bisnis. Data dikumpulkan

melalui FGD, observasi dan pencarian literatur. Data diproses dengan pendekatan kualitatif dan diinterpretasikan dengan pendekatan input-proses-output. Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor kunci yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yaitu keberadaan pasar kompos, ketersediaan kader lingkungan, dan kelompok kerja manajemen lingkungan yang dapat mensinergikan program/kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan sedangkan faktor pendukungnya adalah metode pembiayaan, penegakan peraturan, dan sarana prasarana yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk mengubah perilaku masyarakat dan budaya kerja.

Kata kunci: kader lingkungan, kelompok kerja pengelolaan lingkungan, pasar kompos, pola pembiayaan

PENDAHULUAN

Riset pengelolaan sampah telah banyak dilakukan sebelumnya. Secara umum permasalahan sampah dapat dikelompokkan dalam tiga grup besar yaitu: 1) perilaku manusia, 2) keterbatasan infrastruktur dan teknologi, dan 3) keberlanjutan sistem pengelolaan. Secara lebih rinci permasalahan tersebut diantaranya: kebiasaan membuang sampah sembarangan, tidak adanya fasilitas pemilahan sampah, keterbatasan dana untuk menggunakan teknologi pengolahan sampah yang baik, jumlah sarana angkut yang tidak seimbang dengan luas sebaran dan jumlah permukiman, tidak adanya industri yang memanfaatkan sampah di sekitar pusat timbulan sampah, dan banyak permasalahan lainnya. Selain itu, akurasi data timbulan sampah beserta jenis dan komposisinya - sebagai syarat dasar dalam perencanaan dan operasional pengelolaan sampah (Beigl, Lebersorger and Salhofer, 2008) - juga merupakan masalah pelik yang kerap dihadapi.

Pengelolaan sampah tersebut harus dilakukan secara cermat dan efisien - terutama untuk Daerah Otonomi Baru (DOB) seperti halnya Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) - agar tidak menghabiskan sumber daya yang diperlukan dalam pembangunan. Meskipun secara intuitif dapat dikatakan permasalahan sampah di Kabupaten PALI tidak segenting di wilayah Kota, namun dirasakan perlu untuk segera menerapkan pengelolaan sampah yang baik. Hal ini dikarenakan sifat dari timbulan sampah dimana semakin lama waktu berjalan maka jumlah sampah yang dihasilkan juga semakin banyak dan semakin beragam sehingga meningkatkan kesulitan dalam pengelolaannya. Ditinjau dari sumber, rumah tangga secara akumulatif merupakan penghasil sampah terbesar di Kabupaten PALI.

Telah diketahui bahwa permasalahan sampah merupakan permasalahan yang spesifik lokasi meskipun terdapat kesamaan umum di berbagai wilayah. Namun demikian, keberhasilan pengelolaan sampah memiliki kaitan erat kepada penerimaan secara sosial dari seluruh pemangku kepentingan terhadap model pengelolaan yang ditawarkan (Hung, Ma and Yang, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor kunci dan faktor penunjang dalam sistem pengelolaan sampah berdasarkan perspektif pemangku kepentingan lintas sektoral di Kabupaten PALI.

BAHAN DAN METODE

Jenis dan informan penelitian

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif di bulan Mei-September 2018. Informan penelitian berasal dari berbagai pemangku kepentingan lintas sektoral meliputi 1) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Dinas

Lingkungan Hidup; Dinas Kesehatan; Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; Kesatuan Berbangsa dan Politik; Lurah Pasar Bhayangkara), 2) organisasi kemasyarakatan dan komunitas (Komunitas Pujasuma), 3) praktisi pengelolaan sampah dan 4) Kelompok Usaha Bersama Peduli Sampah.

Teknik pengumpulan data

Data dikumpulkan melalui wawancara, pengamatan lapangan dan diskusi kelompok terarah (*focus group discussion/FGD*) serta penelusuran data sekunder dari publikasi yang dapat terverifikasi sumbernya. Data yang terkumpul divalidasi dan diuji reliabilitasnya melalui dua metode yaitu 1) triangulasi pengumpul data (peneliti) dan 2) triangulasi sumber informasi. Data FGD, wawancara dan observasi lapangan dicatat dalam *field note*.

Teknik analisis data, interpretasi dan parameter penelitian

Data kemudian diklasifikasikan dan dipetakan dalam matrik analisis untuk menemukan hubungan kausal antar parameter penelitian. Hasil pemetaan hubungan kausal kemudian diinterpretasikan menurut hubungan Input-Proses-Output. Parameter yang diteliti dan diamati dikelompokkan ke dalam lima bagian: 1) *Machine*, didefinisikan sebagai segala peralatan dan sarana yang diperlukan untuk mengelola sampah; 2) *Methods*, didefinisikan sebagai cara kerja yang dilaksanakan dalam mengelola sampah; 3) *Money*, didefinisikan sebagai biaya yang tersedia atau dikeluarkan dalam mengelola sampah; 4) *Materials*, didefinisikan sebagai jumlah dan ketersediaan sampah yang dikelola; dan 5) *Men*, didefinisikan sebagai jumlah dan ketersediaan tenaga kerja yang mengelola sampah.

Definisi operasional

Definisi konsep yang digunakan sebagai berikut:

1. Timbulan sampah, didefinisikan sebagai sampah yang dihasilkan dari aktivitas sehari-hari penduduk berupa sampah makanan, sampah kemasan, kegiatan membersihkan pekarangan dan sampah lainnya yang sejenis dengan sampah rumah tangga seperti sampah pasar.
2. Pengelolaan Sampah, didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas yang terpadu dalam mengelola sampah terbagi dalam delapan aktivitas: a) mengurangi timbulan sampah; b) memanfaatkan sampah untuk keperluan lain; c) memilah sampah; d) mengumpulkan sampah; e) mendaur ulang; f) mengangkut sampah; g) mengolah sampah; dan h) membuang produk akhir sampah dalam bentuk yang paling ramah lingkungan.
3. Berkelanjutan, didefinisikan sebagai pengelolaan sampah yang memenuhi kriteria: a) secara finansial dapat dibiayai; b) secara teknis dapat diterapkan dengan layak; c) secara sosial dapat diterima oleh masyarakat; dan d) secara ekologis ramah lingkungan.

HASIL

Focus Group Discussion pada tanggal 7 Mei 2018 dan 31 Juli 2018 menghasilkan beberapa informasi tentang pengelolaan sampah rumah tangga di Kabupaten PALI. Butir penting dari diskusi dipetakan dalam Tabel 1. Informan dalam diskusi sepakat menyatakan tingkat kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah yang baik masih relatif sangat rendah. Masyarakat memiliki kecenderungan untuk membakar sampah. Perilaku

membakar sampah tersebut terutama dilakukan oleh rumah tangga yang memiliki *flare* (semacam nyala api pembuangan gas) di lingkungan permukimannya. Perilaku membuang sampah sembarangan juga terlihat di lokasi penampungan sampah sementara yang berada di area pasar. Meskipun telah disediakan bak penampung, sampah diketemukan berserakan disekitar bak.

Di area permukiman perkotaan (Kec. Talang Ubi) yang diamati telah nampak adanya kesadaran masyarakat untuk mengumpulkan sampah dalam kantung/tong sampah di area tepi jalan rumahnya. Namun demikian sampah yang telah dikumpulkan tersebut belum terpilah dan terpisah. Di area permukiman perdesaan (Kec. Penukal dan Kec. Abab), terlihat banyak tanda bekas pembakaran sampah di sekitar rumah warga. Namun di permukiman yang dekat dengan badan air (tepi sungai/tepi rawa) dijumpai banyak titik *open dumping*.

Tabel 1. Matriks SWOT Pengelolaan Sampah

<p>KEKUATAN [STRENGTHS (S)]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • memiliki pengangkutan sampah terjadwal • memiliki fasilitas Tempat Pembuangan Akhir • memiliki Pelopor Lingkungan • memiliki kelompok usaha yang menghasilkan kompos • Pemkab memiliki program kerja Bank Sampah • Sudah ada desa yang mengelola retribusi sampah • memiliki program bantuan pupuk untuk petani • memiliki ormas yang mendukung program pengelolaan sampah • Adanya contoh pembinaan pengolahan sampah • Adanya dukungan kebijakan Dana Desa yang memungkinkan tumbuhnya pemberdayaan masyarakat • Adanya dukungan Program Kampung Keluarga Berencana BKKBN • Adanya dukungan program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 	<p>KELEMAHAN [WEAKNESSES (W)]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • mayoritas sampah belum terpilah • sebagian warga membuang sampah sembarangan • sebagian warga cenderung membakar sampah • jangkauan layanan sampah masih terbatas • belum ada pasar kompos • informasi produk kompos belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat • infrastruktur/akses pengangkutan belum optimal • kualitas kompos belum diketahui ke-stabilannya • sarana menampung sampah terpilah masih terbatas • data jumlah dan komposisi pasti sampah belum terdokumentasi dengan baik sehingga menyulitkan perencanaan pengelolaan sampah • perlu kerja keras dalam menjalankan program pengendalian penduduk • sebaran dan kepadatan penduduk antar wilayah relatif beragam
<p>ANCAMAN [THREATS (T)]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemalsuan pupuk kompos dengan menggunakan tatal karet/lumpur pabrik karet • migrasi penduduk yang belum memiliki kesadaran dalam mengelola sampah yang ramah lingkungan • pupuk kimia yang lebih disukai petani karena memberikan dampak instan kepada tanaman karet/sawit • meningkatnya volume barang konsumsi ke Kab. PALI yang berpotensi menambah jumlah volume sampah plastik 	<p>PELUANG [OPPORTUNITIES (O)]:</p> <ul style="list-style-type: none"> • adanya kewajiban usaha pertambangan untuk rehabilitasi lahan • petani karet dan perkebunan sawit memiliki kebutuhan terhadap pupuk • merupakan peluang usaha untuk meyerap tenaga kerja lokal • adanya mitra global yang peduli dengan pengelolaan sampah

sumber: data primer, diolah

Titik *open dumping* juga banyak dijumpai di sekitar ruang publik seperti pasar, puskesmas dan sekolah. Di beberapa titik pengamatan juga diketemukan adanya fasilitas

tong sampah organik-anorganik namun belum dimanfaatkan secara optimal. Ukuran dan bentuk wadah penampung sampah ditemukan belum seragam. Beberapa usaha pengelolaan sampah telah dilakukan oleh berbagai pihak (pemerintah, perusahaan, organisasi kemasyarakatan dan perorangan) yaitu mengolah bahan organik menjadi produk pupuk dan mendaur ulang bahan non-organik (plastik dan logam) namun relatif masih terbatas cakupannya. Diskusi juga mengungkapkan bahwa belum semua komunitas atau kelompok usaha yang mengolah sampah menjadi pupuk organik menyebarkan informasi produk yang dihasilkannya secara masif ke calon pengguna potensial.

Terdapat klaim dari salah satu kelompok usaha pengelola sampah bahwa telah ada upaya untuk mendorong pemerintah kabupaten menerbitkan peraturan daerah/peraturan bupati tentang pengelolaan sampah namun belum terealisasi. Kelompok usaha tersebut juga mengakui telah mengumpulkan data timbulan sampah (berat dan komposisi) secara mandiri dari nasabah bank sampah yang dikelolanya - namun tidak secara teratur - dan menginformasikannya ke pihak terkait. Pola pembiayaan pengelolaan sampah yang dilakukan ada dua yaitu masyarakat menabung sampah yang sudah terpilah atau membayar retribusi untuk sampah yang tidak terpilah. Jumlah nasabah aktif (data pada saat diskusi) sebanyak 400-an rumah tangga. Kelompok usaha ini juga telah bekerja sama mengelola 8 desa yang ada di sekitar unit usaha. Pola kerjasamanya berupa kelompok usaha menerima sampah yang telah dikumpulkan oleh pengelola desa dengan ketentuan pengelola membayar retribusi sebesar Rp. 25.000,00 per rumah tangga per bulan. Besaran retribusi tersebut merupakan hasil kesepakatan kedua pihak bukan atas penetapan dari Pemerintah Kabupaten. Akhir diskusi mengerucut kepada beberapa alternatif pembiayaan pengelolaan sampah seperti penetapan retribusi melalui perda kepada semua rumah tangga seperti halnya penerapan pajak penerangan jalan umum yang langsung dibebankan ke dalam rekening tagihan pengguna, pengelolaan sampah dipihak ketigakan kepada badan usaha swasta, pengelolaan sampah melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan semisalnya.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan perlunya rekayasa sosial untuk mengubah perilaku buruk masyarakat dalam mengelola sampah. Hal ini dapat dilakukan melalui beberapa macam cara tergantung dari karakteristik penduduk. Dengan demikian pemahaman dinamika penduduk sangat diperlukan untuk mengambil langkah antisipatif. Dinamika penduduk sendiri terdiri dari dua macam yaitu dinamika kuantitas (perubahan jumlah penduduk) dan dinamika kualitas (misal: perubahan kesejahteraan). Dari sisi dinamika kuantitas, Kabupaten PALI diperkirakan akan mengalami proses urbanisasi relatif lebih cepat. LPP Kabupaten PALI mencapai 1,57% pertahun pada periode 2010-2016 (BPS, 2017a) sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan LPP Sumsel (sebesar 1,46% pertahun) pada periode yang sama. LPP yang relatif tinggi tersebut secara teoritis dapat terjadi karena dua hal: 1) terjadinya fertilitas yang tinggi di wilayah tersebut dan 2) dikarenakan adanya migrasi penduduk masuk ke dalam wilayah tersebut. Kedua jenis penyebab urbanisasi tersebut memberikan dampak yang berbeda terhadap pengelolaan sampah.

Ditinjau dari struktur umur penduduk, Kabupaten PALI memiliki ciri struktur penduduk muda dengan bentuk piramida. Kelompok umur 0-4 tahun di tahun 2017 memiliki proporsi lebih kecil dari kelompok umur 5-9 tahun yang menandakan ada penurunan jumlah kelahiran dalam periode 5 tahun terakhir dibandingkan sebelumnya (BPS, 2017c). Berdasarkan data tersebut maka dapat diperkirakan bahwa arus migrasi

masuk merupakan penyumbang utama dari kenaikan LPP. Migrasi masuk penduduk memberikan dampak positif maupun negatif terhadap modal sosial suatu wilayah. Migrasi penduduk yang memiliki keterampilan dan berusia produktif dapat meningkatkan modal sosial dan berpotensi meningkatkan laju roda perekonomian yang akan berkorelasi terhadap peningkatan konsumsi (dan menghasilkan sampah) sedangkan penduduk masuk dengan keterampilan rendah akan memperlambat roda perekonomian yang akan memperlambat kemampuan rumah tangga untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sampah (semisal membayar iuran sampah, dsb). Penduduk masuk juga membawa budaya keseharian tersendiri yang dapat bersifat konstruktif ataupun destruktif terhadap pengelolaan sampah. Memahami dinamika penduduk tersebut maka pemangku kepentingan pengelolaan sampah di Kabupaten PALI perlu mencetak kader peduli lingkungan di setiap permukiman disesuaikan dengan sebaran dan kepadatan penduduknya melalui jalur pendidikan formal (sekolah adiwiyata) maupun informal (sosialisasi dan pelatihan).

Ditinjau dari segi pertumbuhan ekonomi wilayah, jumlah pengeluaran konsumsi per kapita penduduk Kabupaten PALI selama periode 2010-2016 menunjukkan tren peningkatan sebesar 10,45% pertahun. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi mikro di wilayah Kabupaten PALI. Selama periode tersebut terdapat fluktuasi besaran proporsi belanja konsumsi makanan perkapita perbulan namun masih berada dalam kisaran di atas 60% (BPS, 2017b). Besaran proporsi tersebut menandakan sirkulasi produk bahan habis pakai relatif berlangsung cepat yang memiliki dampak terhadap percepatan jumlah timbulan sampah. Artinya, penambahan timbulan sampah di Kabupaten PALI diperkirakan akan banyak berupa sampah berbahan organik yang berpotensi untuk diolah menjadi kompos dan berpeluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Satu permasalahan yang mencuat dalam diskusi adalah tidak adanya penampung/pembeli reguler dari produk pupuk hasil olahan sampah tersebut. Padahal hasil penjual pupuk merupakan salah satu insentif yang sangat baik dalam menjaga roda usaha berjalan secara mandiri (Zurbrügg *et al.*, 2005). Kesulitan dalam memasarkan pupuk sejatinya tidak perlu terjadi. Kabupaten PALI memiliki calon pembeli reguler potensial dari produk pupuk yaitu para petani karet. Berdasarkan informasi yang disampaikan informan, petani karet setidaknya membutuhkan 1,5 pikul pupuk NPK dan 0,5 pikul pupuk kandang per hektar untuk satu kali pemupukan kebun karet yang dimilikinya. Merujuk data ini setidaknya di Kabupaten PALI terdapat celah pasar pupuk kompos. Apabila pupuk kandang dan pupuk kompos dapat saling mensubstitusikan secara langsung maka terdapat peluang serapan setara 1.950 ton pupuk per siklus pemupukan.

Di sisi lain, di dalam dan sekitar wilayah Kabupaten PALI terdapat banyak unit usaha pertambangan. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan mengharuskan setiap perusahaan tambang untuk melakukan revegetasi pada lahan-lahan kritis bekas tambang. Peraturan tersebut merupakan payung hukum yang tepat untuk menjalin kemitraan saling menguntungkan dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian diharapkan terdapat kepastian dalam pemasaran produk kompos. Beberapa upaya dapat dilakukan untuk memastikan pengelolaan sampah di Kabupaten PALI tetap berlanjut semisal mempromosikan pemakaian kompos secara bertahap kepada petani melalui mekanisme program bantuan pupuk, mempromosikan produk kompos untuk keperluan revegetasi lahan bekas penambangan, melaksanakan kegiatan sekolah lapang mengenai pemanfaatan pupuk organik/kompos sebagai bahan penunjang pupuk pabrikan untuk

menjaga kualitas lahan dalam jangka panjang dan menjajaki kerjasama dengan pelaku usaha perkebunan (perusahaan maupun perorangan) untuk menyerap produk kompos.

KESIMPULAN

Penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Kab. PALI belum dilakukan secara sistematis sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Tiga faktor kunci yang diperlukan untuk pengelolaan sampah di Kabupaten PALI yaitu keberadaan pasar kompos, ketersediaan kader lingkungan, dan kelompok kerja manajemen lingkungan yang dapat mensinergikan program/kegiatan dari berbagai pemangku kepentingan sedangkan faktor pendukungnya adalah metode pembiayaan, penegakan peraturan, dan sarana-prasarana yang memadai. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ada kebutuhan untuk mengubah perilaku masyarakat dan budaya kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten PALI atas pendanaan dan fasilitas penelitian yang diberikan. Opini dan pendapat dalam tulisan ini sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak mencerminkan pendapat institusi. Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Beigl P, Lebersorger S, Salhofer S. 2008. Modelling municipal solid waste generation: A review, *Waste Management*, 28(1), pp. 200–214. doi: 10.1016/j.wasman.2006.12.011.
- BPS. 2017a. Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Dalam Angka 2017. BPS Muara Enim.
- BPS. 2017b. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Pengeluaran Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2010-2016. BPS Muara Enim.
- BPS. 2017c. ‘Statistik Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir 2017’. BPS.
- Hung ML, Ma H, Yang WF. 2007. A novel sustainable decision making model for municipal solid waste management, *Waste Management*, 27(2), pp. 209–219. doi: 10.1016/j.wasman.2006.01.008.
- Zurbrügg C. *et al.* 2005. Decentralised composting in Bangladesh, a win-win situation for all stakeholders, *Resources, Conservation and Recycling*, 43(3), pp. 281–292. doi: 10.1016/j.resconrec.2004.06.005.